



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Tanggapan Masyarakat terhadap Korupsi Pejabat Publik dengan  
Menggunakan Analisis Sentimen**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh:

Dheyana Hariyanti

6072001030

**BANDUNG**

**2024**



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Tanggapan Masyarakat terhadap Korupsi Pejabat Publik dengan**  
**Menggunakan Analisis Sentimen**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh:

Dheyana Hariyanti

6072001030

Pembimbing:

Tutik Rachmawati, Ph.D

**BANDUNG**

**2024**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan  
Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dheyana Hariyanti  
Nomor Pokok : 6072001030  
Judul : Tanggapan Masyarakat terhadap Korupsi Pejabat Publik dengan Menggunakan Analisis Sentimen

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada  
Selasa, 25 Juni 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Kristian Widya Wicaksono, Ph.D.

: 

**Sekretaris**

Tutik Rachmawati, Ph.D

: 

**Anggota**

Prof. Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D.

: 

Mengesahkan,  
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dheyana Hariyanti  
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 6072001030  
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Tanggapan Masyarakat terhadap Korupsi Pejabat  
Publik dengan Menggunakan Analisis Sentimen

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis telah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2024



Dheyana Hariyanti

## ABSTRAK

Nama : Dheyana Hariyanti  
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 6072001030  
Judul : Tanggapan Masyarakat terhadap Korupsi Pejabat Publik dengan Menggunakan Analisis Sentimen

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan tanggapan masyarakat terhadap korupsi pejabat publik dengan menggunakan analisis sentimen. Data yang digunakan adalah komentar masyarakat di Twitter pada periode November 2023 hingga Mei 2024. Metode yang digunakan adalah analisis sentimen berbasis *machine learning*. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak *Google Colaboration*. Sedangkan analisis data dilakukan dengan *Communalytic*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sentimen masyarakat positif terhadap korupsi pejabat publik. Temuan ini berbeda dengan hasil analisis manual yang justru menunjukkan sentimen negatif dan sarkasme. Hal ini menunjukkan keterbatasan *machine learning* dalam menggeneralisasi nuansa bahasa alami manusia secara akurat terutama dalam menangkap majas dan rasa bahasa.

Penelitian ini menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan manual untuk memvalidasi keseluruhan hasil sentimen yang ditentukan *machine learning*. Hal ini dilakukan untuk memahami secara mendalam sentimen masyarakat terhadap isu tertentu, seperti korupsi. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akurasi dalam menangkap nuansa bahasa serta mengembangkan teknik analisis yang lebih canggih pada dataset bahasa Indonesia.

***Kata Kunci: Analisis Sentimen, Korupsi Pejabat Publik, Tanggapan Masyarakat***

## ABSTRACT

Name : Dheyana Hariyanti  
Student ID No. : 6072001030  
Title : *Public Sentiment Towards Public Officials Corruption  
Using Sentiment Analysis*

---

*This research aims to comprehensively assess public responses to corruption among public officials using sentiment analysis. The data utilized comprises public comments on Twitter from November 2023 to May 2024. The methodology employed is machine learning-based sentiment analysis. Data collection was facilitated through the use of Google Colaboratory software, while data analysis was conducted using CommuAnalytic.*

*The analysis results indicate a positive public sentiment towards corruption by public officials. This finding contrasts with manual analysis results, which reveal negative sentiments and sarcasm. This discrepancy highlights the limitations of machine learning in accurately generalizing the nuances of natural human language, particularly in capturing figurative language and linguistic subtleties.*

*This study emphasizes the importance of conducting manual verification to validate the overall sentiment results determined by machine learning. This step is crucial for gaining a deeper understanding of public sentiment on specific issues, such as corruption. Furthermore, this research provides recommendations for improving accuracy in capturing language nuances and developing more sophisticated analysis techniques for Indonesian language datasets.*

**Keywords:** *Public Sentiment, Public Officials Corruption, Sentiment Analysis*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul *“Tanggapan Masyarakat Terhadap Korupsi Pejabat Publik Dengan Menggunakan Analisis Sentimen”* dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus karena rahmat dan kuasa-Nya telah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
2. Kedua orang tua terkasih Bapak Antoni Ginting dan Ibu Eha Julaeha Sitepu yang telah mendukung dengan sepenuh hati baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
3. Ibu Tutik Rachmawati, PhD. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
4. Kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada saya selama menjalani pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Teman-teman semasa kecil, Friyanka, Sifa, Andinie, Vanesya, Aldhira, Yohana, Elsas, Yemima, Elsa Intan yang senantiasa menghibur, mendukung, dan menemani penulis dalam suka dan duka selama pengerjaannya.
6. Teman-teman seperjuangan, Ulivia, Farah, Vienka, Gita, Cinta, Dinda, Avina, Immanuela terima kasih telah berjuang, bercanda tawa bersama penulis selama berkuliah, berbagi ilmu dan pengalaman sehingga penulis termotivasi untuk terus berjuang.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan namanya, terima kasih atas kebaikan kalian yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Sebagai penutup, saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, semoga karya ini dapat memberi manfaat dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan yang bermakna. Dengan segenap kerendahan hati, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis.

Bandung, 14 Juni 2024

Dheyana Hariyanti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Machine Learning.....	10
2.2 Analisis Sentimen pada bidang ilmu administrasi publik.....	12
2.3 Analisis Sentimen bermanfaat untuk kebijakan.....	12
2.4 Penelitian Terdahulu .....	14
2.5 Korupsi .....	15
BAB III.....	16
METODE PENELITIAN .....	16
3.1 Jenis Penelitian .....	16
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	17
3.2.1 Jenis Data.....	17
3.2.2 Sumber Data.....	18

3.3 Pengumpulan Data.....	18
3.3.1 <i>Google Colaboration</i> .....	18
3.3.2 <i>Communalytic</i> .....	22
3.4 Analisis Data.....	25
3.5 Keabsahan Data .....	27
BAB IV .....	30
HASIL DAN DISKUSI.....	30
4.1 <i>Posts Per Day</i> .....	30
4.2 <i>Word Cloud</i> .....	41
4.3 <i>Top Ten Posters</i> .....	45
4.4 Analisis Sentimen .....	58
4.4.1 Matriks Silang Sentimen Menggunakan <i>Communalytic</i> .....	62
4.4.2 Analisis Sentimen Manual .....	68
4.4.3 Analisis Toksisitas .....	70
BAB V.....	90
KESIMPULAN DAN SARAN .....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Databoks Tindak Pidana Korupsi.....	2
Gambar 1. 2 Survei Perilaku Anti Korupsi 2020-2023 .....	3
Gambar 1. 3 Diskusi Masyarakat Twitter .....	4
Gambar 3. 1 Langkah Pengumpulan Data Twitter Melalui Google Colaboration .....	19
Gambar 3. 2 Langkah Mendapatkan Autentikasi Token Twitter Melalui Fitur “Inspect Application” .....	19
Gambar 3. 3 Langkah Mencantumkan Auth Token Melalui Google Colaboration .....	19
Gambar 3. 4 Langkah Mengubah File CSV Menjadi File XLSX .....	20
Gambar 3. 5 Langkah Mengunggah File XLSX Melalui Google Drive .....	21
Gambar 3. 6 Langkah Mengubah Kolom Text.....	23
Gambar 3. 7 Langkah Menerjemahkan File XLSX Melalui Google Dokumen.....	24
Gambar 3. 8 Langkah Export File XLSX Menjadi File CSV .....	24
Gambar 3. 9 Langkah Unggah File CSV Pada Google Drive Melalui Fitur “Google Spreadsheet” .....	25
Gambar 3. 10 Langkah Unggah File CSV Pada Communalytic .....	25
Gambar 4. 1 <i>Grafik Posts Per Day</i> November 2023.....	31
Gambar 4. 2 <i>Grafik Posts Per Day</i> Desember 2023 .....	33
Gambar 4. 3 <i>Grafik Posts Per Day</i> Januari 2024 .....	35
Gambar 4. 4 <i>Grafik Posts Per Day</i> Februari 2024 .....	36
Gambar 4. 5 <i>Grafik Posts Per Day</i> Maret 2024 .....	38
Gambar 4. 6 <i>Grafik Posts Per Day</i> April 2024 .....	39
Gambar 4. 7 <i>Grafik Posts Per Day</i> Mei 2024 .....	40
Gambar 4. 8 <i>Word Cloud</i> November 2023.....	42
Gambar 4. 9 <i>Word Cloud</i> Desember 2023 .....	42
Gambar 4. 10 <i>Word Cloud</i> Januari 2024.....	43
Gambar 4. 11 <i>Word Cloud</i> Februari 2024.....	43
Gambar 4. 12 <i>Word Cloud</i> Maret 2024.....	44
Gambar 4. 13 <i>Word Cloud</i> April 2024.....	44
Gambar 4. 14 <i>Word Cloud</i> Mei 2024 .....	45
Gambar 4. 15 <i>Top Ten Posters</i> November 2023 .....	45
Gambar 4. 16 <i>Top Ten Posters</i> Desember 2023.....	47

Gambar 4. 17 <i>Top Ten Posters</i> Januari 2024 .....	48
Gambar 4. 18 <i>Top Ten Posters</i> Februari 2024 .....	50
Gambar 4. 19 <i>Top Ten Posters</i> Maret 2024 .....	52
Gambar 4. 20 <i>Top Ten Posters</i> April 2024 .....	54
Gambar 4. 21 <i>Top Ten Posters</i> Mei 2024 .....	56
Gambar 4. 22 Analisis Sentimen November 2023 .....	59
Gambar 4. 23 Analisis Sentimen Desember 2023.....	59
Gambar 4. 24 Analisis Sentimen Januari 2024 .....	60
Gambar 4. 25 Analisis Sentimen Februari 2024 .....	60
Gambar 4. 26 Analisis Sentimen Maret 2024 .....	61
Gambar 4. 27 Analisis Sentimen April 2024 .....	61
Gambar 4. 28 Analisis Sentimen Mei 2024 .....	62
Gambar 4. 29 Matriks Silang Sentimen November 2023.....	64
Gambar 4. 30 Matriks Silang Sentimen Desember 2023 .....	64
Gambar 4. 31 Matriks Silang Sentimen Januari 2024.....	65
Gambar 4. 32 Matriks Silang Sentimen Februari 2024.....	65
Gambar 4. 33 Matriks Silang Sentimen Maret 2024.....	66
Gambar 4. 34 Matriks Silang Sentimen April 2024 .....	66
Gambar 4. 35 Matriks Silang Sentimen Mei 2024 .....	67
Gambar 4. 36 Tren Toksisitas Sentimen November 2023 .....	71
Gambar 4. 37 Tren Toksisitas Sentimen Desember 2023 .....	73
Gambar 4. 38 Tren Toksisitas Sentimen Januari 2024.....	76
Gambar 4. 39 Tren Toksisitas Sentimen Februari 2024.....	78
Gambar 4. 40 Tren Toksisitas Sentimen Maret 2024.....	80
Gambar 4. 41 Tren Toksisitas Sentimen April 2024.....	82
Gambar 4. 42 Tren Toksisitas Sentimen Mei 2024.....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya .....	7
Tabel 3. 1 Pengumpulan Data Melalui Google Colaboration .....	20
Tabel 4. 1 <i>Tren Posts Per Day</i> November 2023 .....	32
Tabel 4. 2 <i>Tren Posts Per Day</i> Desember 2023 .....	34
Tabel 4. 3 <i>Tren Posts Per Day</i> Januari 2024.....	35
Tabel 4. 4 <i>Tren Posts Per Day</i> Februari 2024.....	37
Tabel 4. 5 <i>Tren Posts Per Day</i> Maret 2024.....	38
Tabel 4. 6 <i>Tren Posts Per Day</i> April 2024.....	39
Tabel 4. 7 <i>Tren Posts Per Day</i> Mei 2024.....	40
Tabel 4. 8 <i>Top Ten Posters</i> November 2023 .....	46
Tabel 4. 9 <i>Top Ten Posters</i> Desember 2023 .....	47
Tabel 4. 10 <i>Top Ten Posters</i> Januari 2024 .....	49
Tabel 4. 11 <i>Top Ten Posters</i> Februari 2024 .....	51
Tabel 4. 12 <i>Top Ten Posters</i> Maret 2024 .....	53
Tabel 4. 13 <i>Top Ten Posters</i> April 2024 .....	55
Tabel 4. 14 <i>Top Ten Posters</i> Mei 2024 .....	57
Tabel 4. 15 Analisis Sentimen Manual November 2023 - Mei 2024.....	69
Tabel 4. 16 Komentar dengan tingkat Toksisitas Tertinggi pada bulan November 2023 .....	72
Tabel 4. 17 Komentar dengan tingkat Toksisitas Tertinggi pada bulan Desember 2023.....	74
Tabel 4. 18 Komentar dengan tingkat Toksisitas Tertinggi pada bulan Januari 2024 .....	77
Tabel 4. 19 Komentar dengan tingkat Toksisitas Tertinggi pada bulan Februari 2024 .....	79
Tabel 4. 20 Komentar dengan tingkat Toksisitas Tertinggi pada bulan Maret 2024 .....	81
Tabel 4. 21 Komentar dengan tingkat Toksisitas Tertinggi pada bulan April 2024 .....	83
Tabel 4. 22 Komentar dengan tingkat Toksisitas Tertinggi pada bulan Mei 2024 .....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus korupsi merupakan isu yang tak kunjung usai diperbincangkan masyarakat di media sosial. Mengingat berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi dengan menetapkan peraturan, seperti UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan sebagainya.<sup>1</sup>

Nyatanya, segelintir peraturan yang dibuat pemerintah tak cukup untuk mencegah para koruptor dalam melakukan tindakan korupsi. Dilansir dari data ICW (*Indonesia Corruption Watch*) disebutkan bahwa di era Pemerintah Jokowi pada awal tahun 2023, Indonesia memperoleh IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dengan skor 34 dengan ranking 110 dari 180 negara. Penurunan ini sudah terjadi dua kali semasa jabatannya. Yaitu, di tahun 2019 dengan skor 40 menjadi skor 37 di tahun 2020. Ada waktu IPK mengalami peningkatan di tahun 2021 akan tetapi kembali merosot di tahun 2022. Dapat diartikan, bahwa trend ranking korupsi di masa Presiden Jokowi kembali seperti ranking semula di awal pemerintahannya pada tahun 2014 dengan skor 34.<sup>2</sup> Menurut TI (Transparency International Indonesia) pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 1/3 negara paling korup di dunia dan jauh berbeda jika dibandingkan dengan posisi negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.<sup>3</sup>

---

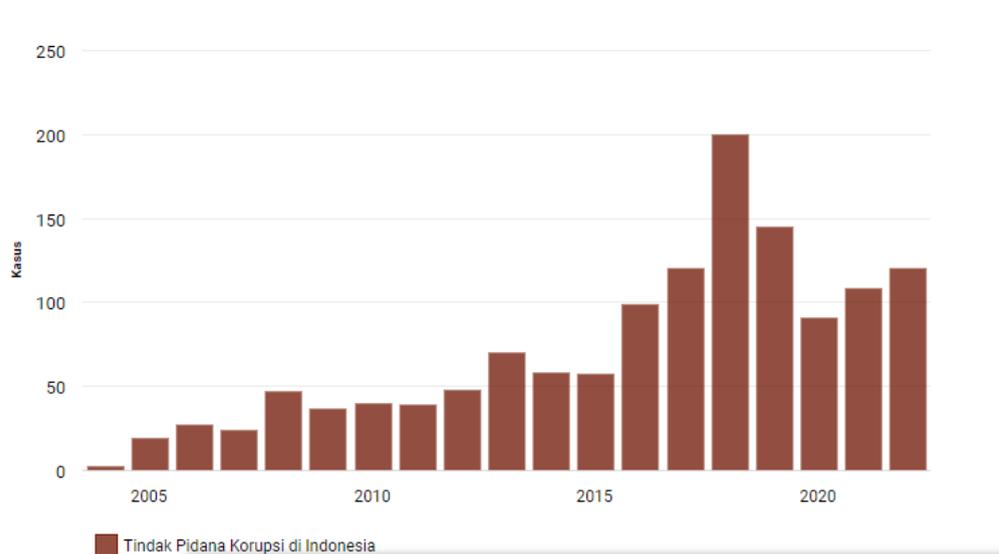
<sup>1</sup> ACLC KPK, “Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> di akses pada 2023

<sup>2</sup> ICW, “Laporan Akhir Tahun ICW 2022” <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022> di akses pada 2023

<sup>3</sup> ICW, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2022” <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> di akses pada 2023

Sementara itu, badan independen Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama semester pertama tahun 2023. Johanis Tanak selaku Wakil Ketua KPK menyebutkan bahwa laporan ini berasal dari lingkungan pemerintahan seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.<sup>4</sup>Merujuk pada data tersebut, sudah banyak kasus korupsi yang merugikan negara baik secara material maupun moral. Kerugian material berkaitan dengan penggunaan uang negara untuk menguntungkan kepentingan individu/kelompok. Sedangkan kerugian moral berhubungan dengan perilaku koruptif yang mengakar dan berpengaruh merusak moralitas bangsa sehingga tindak pidana korupsi tak hanya berhubungan dengan penggunaan uang negara namun hal kecil yang dianggap biasa seperti tindakan penyalahgunaan wewenang termasuk perilaku koruptif yang berkaitan dengan masalah moralitas dan etika perilaku.<sup>5</sup>

**Gambar 1. 1 Databoks Tindak Pidana Korupsi**



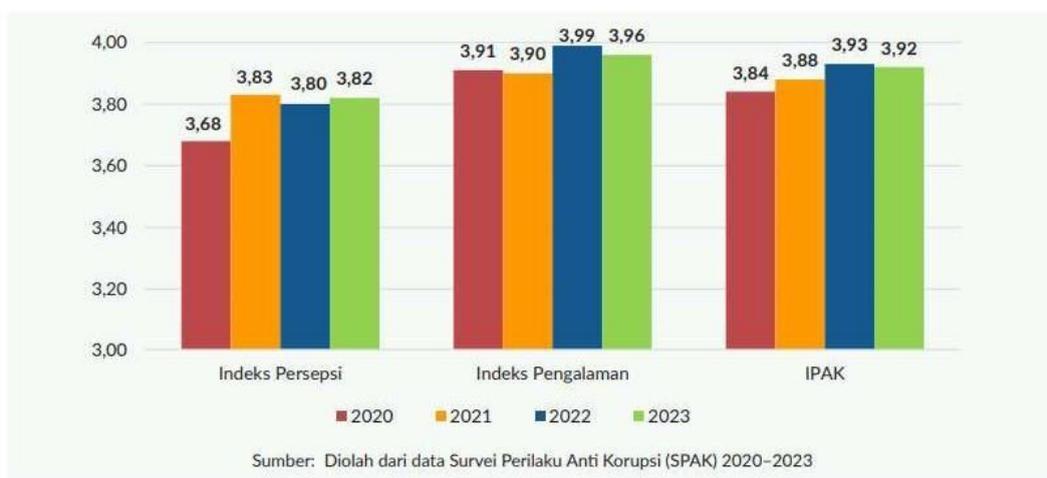
Dilansir dari Databoks, di sepanjang tahun 2004 – 2-22 KPK telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi. KPK mencatat bahwa kasus pidana korupsi paling tinggi terjadi pada tahun 2018, sebanyak 200 kasus. Sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2004 dengan jumlah 2. Sementara jika menilik pada jenis perkaranya KPK paling banyak menangani

<sup>4</sup> “KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi Pada Semester I 2023, Terbanyak dari Ibu Kota” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota> di akses pada 2023

<sup>5</sup> Sari, L. K. (2021). *Korupsi dan Perilaku Koruptif*. Academia.edu. [https://www.academia.edu/56133904/MAKALAH\\_PENDIDIKAN\\_ANTI\\_KORUPSI](https://www.academia.edu/56133904/MAKALAH_PENDIDIKAN_ANTI_KORUPSI) diakses December 19,2023

907 kasus penyuapan dan gratifikasi, 277 kasus pengadaan barang dan jasa, 57 kasus penyalahgunaan wewenang, 50 kasus TPPU, 27 kasus pemerasan, 25 kasus perizinan, dan 11 kasus merintang proses KPK. Berdasarkan data KPK dari tahun 2004 sampai 2022, mayoritas kasus ini terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 548 kasus. Sementara di lingkungan pemerintah provinsi terjadi 422 kasus dan 174 kasus. <sup>6</sup>Bukti ini menunjukkan bahwa jenis perkara yang terjadi di sepanjang tahun tersebut adalah penyuapan dan gratifikasi dimana lingkungan pemerintah kabupaten/kota menjadi instansi yang rawan terjerat kasus korupsi.

**Gambar 1. 2 Survei Perilaku Anti Korupsi 2020-2023**



Berdasarkan data SPAK (Survei Perilaku Anti Korupsi) pada tahun 2020 - 2023 yang dilakukan BPS, hasil menunjukkan bahwa IPAK Indonesia saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang semula 3,93 menjadi 3,92. Meski demikian, hasil Indeks Persepsi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan jumlah 3,82 jika dibandingkan tahun 2022 yaitu 3,80. Namun jika melihat hasil Indeks Pengalaman saat ini mengalami penurunan menjadi 3,96 yang semula 3,99 pada tahun 2022. Oleh karena itu, survei ini menunjukkan hasil IPAK dan Indeks Pengalaman Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023. Sedangkan, untuk Indeks Persepsi saat ini mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mengalami perluasan pemahaman akan pentingnya perilaku anti korupsi.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Annur, C. M. (2023, March 9). *Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 hingga 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022> Retrieved December 11, 2023

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik. (2023, November 6). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023--sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html> Retrieved December 11, 2023

Pada bulan November 2023 ditunjukkan beberapa diskusi masyarakat yang menunjukkan sentimen negatif terhadap pejabat publik. Terbentuknya diskusi ini didukung oleh salah satu akun Muhammad Said Didu yang berkomentar terkait tersangka pidana korupsi, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPK RI, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan BPK RI, dan beberapa menteri lainnya. Komentar yang dituliskan akun tersebut membuka ruang dan koneksi bagi pengguna lain untuk berdiskusi tentang isu yang ramai diperbincangkan. Ada pun komentar dituliskan dengan kalimat sindiran/sarkasme hal ini sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1. 3 Diskusi Masyarakat Twitter**



Lain halnya dengan hasil survei *Edelman Trust Barometer* pada tahun 2022, Indonesia termasuk empat besar negara yang tingkat kepercayaan masyarakatnya tinggi terhadap pemerintahan, yaitu sebesar 76%, diikuti Arab Saudi 82%, Uni Emirat Arab 87%, dan Tiongkok 91%.<sup>8</sup> Meski begitu, hasil survei ini kontradiktif dengan **maraknya kasus korupsi**

<sup>8</sup> Nurjanah, A. R. (2022, June 22). *Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah di Indonesia Halaman 1*. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/aisyahrani/62b289f73835003ed20ae6a2/kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-di-indonesia> Retrieved December 11, 2023

**di Indonesia yang justru menuai tanggapan negatif masyarakat.** Tanggapan negatif ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam melayani kepentingan publik. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena ketidakselarasan antara ucapan dengan tindakan yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tiga temuan awal yang akan dibahas sebagai berikut.

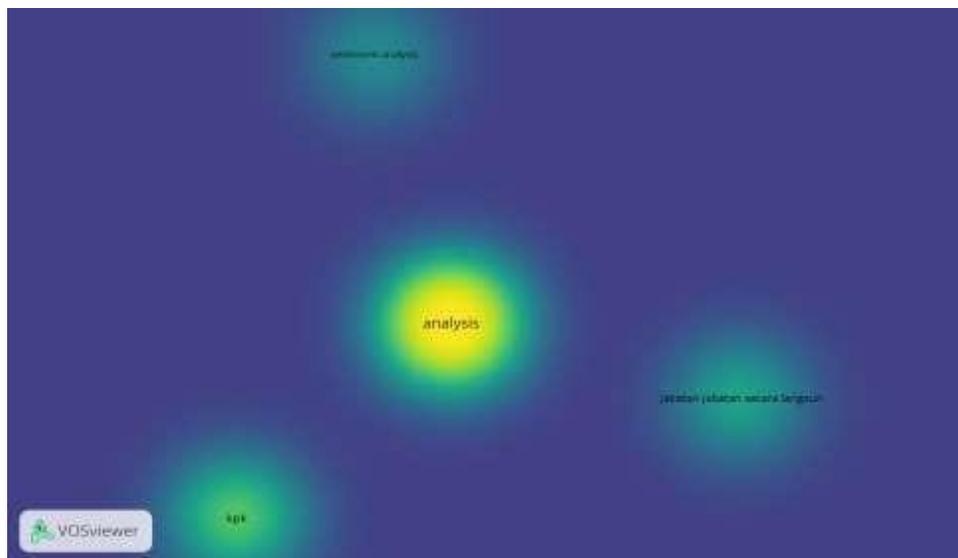
**Pertama,** masyarakat geram atas pembelaan Mantan Menteri Sosial, Juliari yang meminta untuk dibebaskan dari tuntutan hukum kasus korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 dengan alasan tak tega kepada anak dan istrinya. Hasil analisis netray menunjukkan bahwa terdapat 83.634 tweet selama tanggal 6 Agustus sampai 12 Agustus 2021. Jumlah tweet paling banyak terjadi pada tanggal 11 Agustus dengan total 40.009 tweet selama 24 jam. Dengan jumlah interaksi publik pada topik ini sebesar 535,4 juta termasuk kategori reply, retweet, dan favorites terhadap tweet yang dapat menjangkau kurang lebih 143,7 akun berbahasa Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat 43.440 tweet sentimen negatif dengan 2.563 sentimen positif terhadap topik Pledoi Korupsi Bansos Juliari (Paradhi, 2021).

**Kedua,** masyarakat tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung mengenai remisi hukuman kasus benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Terlihat dari persetujuan Mahkamah Agung terhadap *judicial review* Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku dengan UU No 12 Tahun 1995 sebagai aturan pokoknya. Analisis ini dilakukan pada Januari 2022 dengan menggunakan pemanfaatan media sosial, yaitu twitter untuk menganalisis opini masyarakat yang analisisnya dibantu dengan aplikasi NVivo 12 Plus. Dimana, “Korupsi Menteri” dan “Edhy Prabowo” menjadi kata kunci yang paling banyak muncul di twitter dengan hasil analisis word cloud, yaitu kerugian, hukuman, akibat, korupsi, koruptor (Pamungkas et al., 2021).

**Ketiga,** masyarakat mendesak pemerintah untuk memberhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK karena kontroversinya dalam hal pembocoran dokumen korupsi, pelanggaran kode etik, dan menjadikan KPK sebagai kepentingan politiknya. Pertama, berkaitan dengan pemberhentian Brigjen Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan karena masa tugasnya di Polri sudah berakhir sejak 31 Maret 2023. Sedangkan, Kapolri sudah memperpanjang masa tugas Brigjen Priantoro di KPK dengan bukti surat pimpinan KPK pada 29 Maret 2023. Kedua, isu pembocoran dokumen rahasia penyelidikan KPK terhadap penggeledahan kantor

kementerian ESDM, berawal dari cuitan viral pada 6 April 2023 di twitter dengan postingan hasil screenshot pesan Whatsapp yang menunjukkan untuk memberi peringatan terhadap anggota kantor ESDM agar berhati-hati atas penyelidikan yang dilakukan KPK. Hasil Drone Emprit menggunakan *Social Network Analysis* (SNA) pada tanggal 1-8 April menunjukkan terdapat 77% sentimen negatif dan 18% sentimen positif masyarakat. Dimana, puncaknya terjadi pada tanggal 8 April 2023 yang disebabkan oleh isu pemecatan Brigjen Priantoro dan dugaan pembocoran dokumen korupsi (Permana, 2023).

Adapun yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan penelitian terkait tanggapan masyarakat terhadap korupsi pejabat publik masih jarang menggunakan analisis sentimen. Hal ini dapat dilihat dari hasil visualisasi yang menunjukkan cluster warna terang dan redup. Seperti cluster “*analysis*” memberikan makna bahwa sudah banyak riset yang melakukan analisis tentang pejabat publik. Namun, lain halnya dengan cluster “*sentiment analysis*” ditunjukkan dengan warna redup. Seperti yang terlihat pada gambar berikut.



*Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya*

No	Penulis	Judul	Nama Jurnal dan Tahun	Metode	Data	Hasil
1.	Eny Ratnasari	Analisis Sentimen Kepala Daerah Terpilih Jelang dan Pasca Pelantikan Resmi Sebagai Pemimpin Daerah Terpilih pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah	Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah (2021)	Menggunakan metode netnografi sebagai alat analisis untuk memonitor sosial media	Melalui <i>software</i> Brand24 data dikumpulkan dari twitter, website, blog, video, forum, dan berita.	Hasil menunjukkan sentimen positif terhadap pelantikan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta.
2.	Abdul Syakir, Firman Noor Hasan	Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Perilaku Korupsi Pejabat Pemerintah Berdasarkan Tweet Menggunakan Naive Bayes Classifier	Jurnal Media Informatika Budidarma (2023)	Menggunakan metode Naive Bayes Classifier untuk mengkategorikan sentimen positif, netral, dan negatif.	Melalui <i>software</i> Rapidminer data dikumpulkan dari twitter	Hasil menunjukkan sentimen negatif terhadap perilaku korupsi pejabat pemerintah dengan jumlah 224 sentimen negatif dan 95 sentimen positif.

3.	Ilham Taufik, Slamet Adji Pamungkas	Analisis Sentimen Terhadap Tokoh Publik Menggunakan Algoritma Support Vector Machine	Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018)	Menggunakan metode Neural Network dengan mengkategorikan terhadap dua sentimen, yaitu positif dan negatif	Melalui <i>software</i> pemodelan machine data dikumpulkan dari twitter	Hasil menunjukkan penggunaan algoritma SVM terhadap tokoh publik akurat dengan hasil Kernel linear 80%, Kernel sigmoid 85%, dan Kernel sigmoid 81%
----	-------------------------------------	--	--	---	---	--

Dengan adanya indikasi tanggapan negatif masyarakat yang sudah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara keseluruhan sentimen masyarakat terhadap korupsi pejabat publik sehingga penelitian ini mengambil judul: **Tanggapan Masyarakat terhadap Korupsi Pejabat Publik dengan Menggunakan Analisis Sentimen.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini: **Bagaimana *machine learning* menangkap sentimen masyarakat terhadap korupsi pejabat di Indonesia ?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap korupsi pejabat publik dengan menggunakan analisis sentimen.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman tentang analisis sentimen tanggapan masyarakat terhadap korupsi pejabat publik.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian sejenis tentang analisis sentimen tanggapan masyarakat terhadap korupsi pejabat publik.
3. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi untuk mempelajari tentang analisis sentimen tanggapan masyarakat terhadap korupsi pejabat publik.